

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PKPP

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu, merupakan suatu Organisasi Instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor : 65 Tahun 2016 Tanggal 21 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu . Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Eselon II/A yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Desentralisasi dan Tugas Dekonsentrasi.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
2. Pelaksana kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan pertanahan;
5. Pemberian izin lokasi lintas kabupaten/kota;
6. Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;

Untuk melaksanakan tugas serta fungsi, Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Provinsi Bengkulu dibentuk organisasi yang mampu mendorong semua kegiatan dinas. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas yaitu :

- Menyelenggarakan Perumusan, Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Kesekretariatan, Bidang Perumahan, bidang Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan dan Pengendalian, Unit pelaksana teknis Dinas (UPTD) serta Jabatan Fungsional di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu.
- Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta Pertanahan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas yaitu :

- Mempunyai Tugas mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, kelembagaan, serta menginventarisir permasalahan persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 2 Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan perlengkapan : Mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, mengelola pengadministrasian keuangan dan perbendaharaan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran,
- b. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan : Mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan.

4. Bidang Perumahan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas :

- Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di bidang Perumahan yang mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perumahan dibantu oleh 3 Seksi :

- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan;

- b. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan;
- c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi

5. Bidang Kawasan Permukiman

Dipimpin Kepala Bidang yang mempunyai tugas :

- Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di bidang Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas : Melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kawasan Permukiman dibantu oleh 3 Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan : Melaksanakan tugas menyelenggarakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas : Melaksanakan tugas pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian : Melaksanakan tugas pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

6. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Pertanahan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas, yaitu :

- Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman pelaksanaan bantuan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan provinsi dan Kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 Seksi, yaitu :

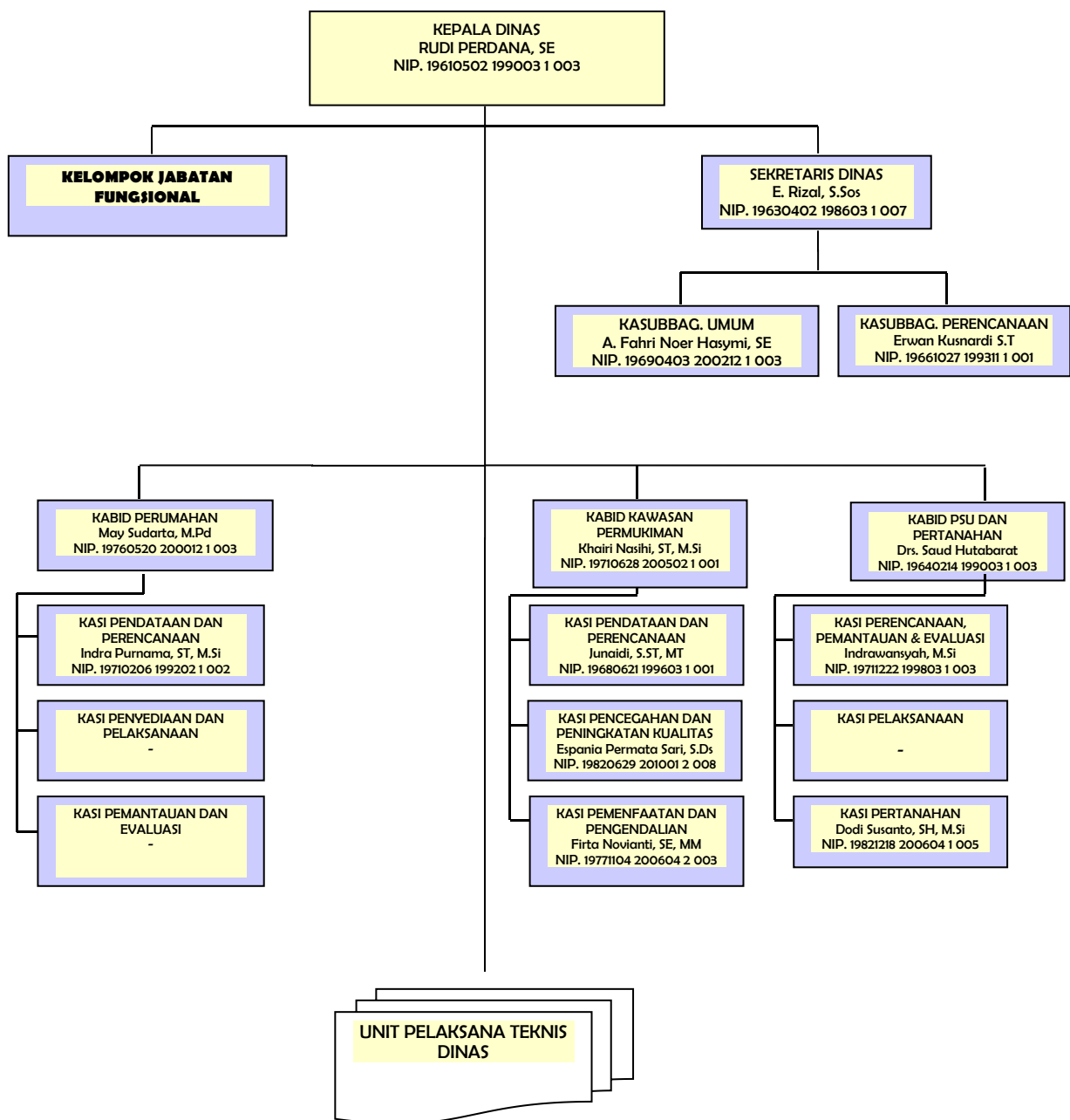
- a. Seksi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi : Menyelenggarakan fungsi perencanaan penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , merumuskan kebijakan daerah, Mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung, memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan;

- b. Seksi Pelaksanaan : Mempunyai tugas Menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. Seksi Pertanahan : Menyelenggarakan pelaksanaan pemberian izin lokasi lintas daerah provinsi, melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, menyelesaikan sengketa tanah garapan lintas daerah provinsi, menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Pusat, menetapkan subjek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas kabupaten/kota, merencanakan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

8. Kelompok Jabataan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu

SUMBER DAYA OPD

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Bengkulu dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala dinas dan saat ini jumlah PNS 47 orang dan tenaga harian lepas 4 orang yang terdistribusi pada masing-masing Bidang, ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Unit Kerja/Bagian	PNS (Orang)	Honorar (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Bidang Sekretariat	16	3	19
2	Bidang Perumahan	8	1	9
3	Bidang Kawasan Permukiman	11	-	11
4	Bidang Prasarana, sarana dan utilitas umum dan Pertanahan	9	-	9
JUMLAH		44	4	48

Kualitas profesionalisme pegawai yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu, salah satu aspek yang dilihat antaranya adanya latar belakang pendidikan Informal dan mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan pemberhentian pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, syarat yang harus dimiliki lulus pendidikan struktural sesuai dengan kompetensi dan eselon.

Gambaran tentang kondisi pegawai dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bengkulu baik dilihat dari tingkat golongan dan pendidikan serta jenis kelamin lebih jelas dapat dilihat pada tabel – tabel dibawah ini ;

GOLONGAN					PENDIDIKAN (ORANG)						
I	II	III	IV		SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2
-	5	46	6		-	-	9	3	-	31	14
Jumlah					57						

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	IV	6	
2	III	38	8
3	II	5	-
4	I	-	-
JUMLAH		49	8

2.2 KINERJA PELAYANAN PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan , ada pula yang tambah, dan ada pula yang menerus, berdasarkan kebutuhan. Adapun Pencapaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu berdasarkan Renstra PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Bengkulu berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Adapun indikator kinerja dalam pelaksanaan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu terdapat 12 Indikator Kinerja, dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun			
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah rumah layak huni yang di bangun (unit)	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah rumah yang direlokasi dari area rawan bencana dan pasca bencana (unit)	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah Permukiman kumuh yang di tingkatkan kualitasnya (kws)	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah jenis sarana prasarana di kawasan perumahan dan permukiman yangh di bangun	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Belum ada kajian/ aturan SPM Karena OPD Baru

Bengkulu, Januari 2021
Mengetahui,
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertana

Rudi Perdana, SE
NIP. 196105021990031003

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-					Rata-rata	
	201 2	201 3	201 4	201 5	201 6	201 2	201 3	201 4	201 5	201 6	201 2	201 3	201 4	201 5	201 6	Anggar an	Realisa si
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Bidang Perumahan																	
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bidang Kawasan Permukiman																	
Peningkatan layanan infrastruktur dasar sanitasi lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peningkatan layanan infrastruktur dasar jalan lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peningkatan layanan infrastruktur dasar air minum rumah tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Peningkatan layanan infrastruktur dasar pengelolaan sampah rumah tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Pertanahan																	
Prosentase jalan lingkungan di permukiman dalam kondisi baik / sedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kawasan permukiman yang jalan lingkungan belum memadai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jumlah fasilitas pendukung pengelolaan persampahan permukiman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kawasan yang telah memiliki saluran drainase jalan permukiman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prosentase kawasan permukiman tersedianya MCK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kawasan permukiman yang dibutuhkan lampu penerangan jalan umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mengatasi kawasan / permukiman rawan banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prosentase penanganan permasalahan kondisi lahan layak huni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prosentase pembebasan lahan pendukung program perumahan, kawasan permukiman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bengkulu, Februari 2017

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Provinsi Bengkulu

RUDI PERDANA, SE
NIP. 19610502 199003 1 003

Dari Tabel 2.1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari OPD DPKPP Provinsi Bengkulu belum dapat di ukur, hal ini disebabkan OPD DPKPP Baru berdiri Tahun 2017, berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 65 tahun 2016.

2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu meliputi urusan perumahan, permukiman kumuh dan prasarana dan sarana utilitas umum ini dapat terlihat dari uraian dibawah ini.

2.3.1 Tantangan pembangunan urusan perumahan

Tantangan pembangunan urusan perumahan meliputi :

- a. Adanya pembangunan lingkungan perumahan yang sering tidak tuntas dalam satu wilayah;
- b. Meningkatkan iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman;
- c. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Para Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
- d. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
- e. Meningkatkan Pendayagunaan Sumberdaya Perumahan dan Permukiman melalui penerapan teknologi tepat guna dalam rangka mendorong pemanfaatan bahan dan produksi bahan bangunan lokal yang murah serta konstruksi bangunan tahan gempa;
- f. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat;
- g. Mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan bagi pengembangan perumahan dan permukiman;
- h. Pemenuhan kebutuhan rumah tidak layak huni dan bantuan perumahan swadaya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu;
- i. Pemenuhan kebutuhan rumah khusus bagi nelayan, bidan desa, dan lain-lain;
- j. Pemenuhan kebutuhan rumah susun bagi masyarakat miskin dan bagi mahasiswa;
- k. Meningkatkan tarap hidup masyarakat miskin agar keluar dari kemiskinan;
- l. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan lingkungan dalam memanfaatkan prasarana jalan lingkungan dan drainase yang tersedia;

2.3.2 Tantangan Pembangunan urusan Kawasan Permukiman

Tantangan Pembangunan urusan Kawasan Permukiman meliputi :

- a) Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan lingkungan yang teletak pada permukiman daerah kumuh dan permukiman perumahan;
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan lingkungan dalam memanfaatkan prasarana jalan lingkungan dan drainase yang tersedia;
- c) Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan lingkungan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan lingkungan yang ada;
- d) Menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan kawasan barat timur Bengkulu ,Kawasan perkotaan Bengkulu;
- e) Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri;

2.3.3 Tantangan pembangunan urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Pertanahan

Tantangan pembangunan urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Pertanahan , meliputi :

- a. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota dan provinsi;
- b. Meningkatkan fasilitas sarana , prasarana dan utilias umum pada kawasan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Menyediakan lahan pertanahan untuk pembangunan perumahan dan lahan perumahan akibat bencana alam ;
- d. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target *Millennium Development Goals* (MDGs) dan gerakan 100 0 100 yang menargetkan bahwa pada tahun 2019 penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air layak untuk kebutuhan air minum;

- e. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan;

2.3.4 Tantangan pembangunan sekretariat

Tantangan pembangunan sekretariat, meliputi :

- a. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat membutuhkan SDM yang handal;
- b. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastuktur pekerjaan umum antartingkatan pemerintahan dan antarpelaku pembangunan;
- c. Penyelenggaraan *good governance* yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.